



Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia

Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua, pada 25 Desember 1975. Natalius Pigai menyelesaikan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tahun 1999. Untuk memperluas wawasan keilmuannya, Natalius Pigai mengikuti berbagai pelatihan dan kursus, antara lain kursus statistika di Universitas Indonesia (2004), kursus pendidikan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2005), serta kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara (2010–2011).

Natalius Pigai memiliki spesialisasi dalam bidang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan advokasi masyarakat marginal. Sebelum menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai telah menjalani perjalanan panjang sebagai aktivis HAM dan penasihat di berbagai lembaga pemerintahan.

Pada 21 Oktober 2024, Natalius Pigai resmi dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan ini menjadi tonggak penting dalam kontribusi Natalius Pigai terhadap penguatan sistem perlindungan HAM di Indonesia.

Pada periode 2012–2017, Natalius Pigai menjabat sebagai salah satu dari sebelas anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam kapasitas tersebut, Natalius Pigai aktif mengadvokasi isu-isu pelanggaran HAM, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, serta mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.

Reformasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penegakan HAM, menjadi perhatian utama dalam setiap fase karier Natalius Pigai. Natalius Pigai pernah bertugas sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1999–

2004), serta sebagai Peneliti Bidang Migrasi Internal dan Internasional di Depnakertrans (2005–2012). Pengalaman tersebut memperkuat pemahaman Natalius Pigai mengenai keterkaitan antara isu HAM, ketenagakerjaan, dan pembangunan nasional.

Sejak 1 Februari 2015, Natalius Pigai aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat marginal dan pembangunan desa. Natalius Pigai juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Irian Jaya Yogyakarta (1997–1999) dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan di Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada periode yang sama. Pada Februari 2016, Natalius Pigai menjadi perhatian publik atas sikap tegas terhadap pentingnya pengawasan HAM yang independen dan akuntabel. Natalius Pigai dikenal luas sebagai sosok yang konsisten dalam menyuarakan kebenaran dan menuntut tanggung jawab dari otoritas negara.

Di tingkat internasional, Natalius Pigai menunjukkan komitmen dalam mendorong pembentukan badan menteri HAM regional di kawasan ASEAN, serta mengusulkan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menjaga prinsip-prinsip HAM, termasuk dalam hal pembangunan dan transfer data lintas negara.

Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai memfokuskan kebijakan pada pengarusutamaan HAM di seluruh sektor pembangunan. Natalius Pigai menginisiasi penyusunan draf Undang-Undang HAM yang mencakup korupsi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, serta mendorong peningkatan anggaran Kementerian untuk memperkuat efektivitas perlindungan HAM di Indonesia.